

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAMPUNG KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI STIMULAN PERKEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

Paulus Bawole<sup>1</sup>, Haryati Sutanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Kristen Duta Wacana  
Jl- Dr. Wahidin Sudirohusodo NO. 5 -25, Yogyakarta 55224, Indonesia

<sup>2</sup>Departemen Bioteknologi, Fakultas Biologi, Universitas Kristen Duta Wacana  
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 5 -25, Yogyakarta 55224, Indonesia

e-mail: paulus@staff.ukdw.ac.id<sup>1</sup>, haryati@staff.ukdw.ac.id<sup>2</sup>

Received : February, 2022

Accepted : February, 2022

Published : March, 2022

### Abstract

*The direction of the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo in Jakarta, April 30, 2020, stated that "The government needs speed to provide the safety of all Indonesian people, although there is no certainty when the pandemic will end." One of the accelerated development programs that continues to be developed to date is the City Without Slums Program or commonly known as the KOTAKU program. This program is an urban village upgrading program in Yogyakarta that opens access to riverside settlements through the development of community-based infrastructure facilities that are environmentally sustainable. The dynamics of this development process are very interesting because many aspects are handled, ranging from spatial planning for settlements, security for living for the community, development of technical infrastructure such as clean water facilities, drainage, sewage treatment plants, disaster mitigation, to the details of inclusive and focused infrastructure development. on gender equality. With the opening of access to settlements on the banks of the river, the economic activities of low-income communities living along the banks of the river have improved and the quality of their residential environment has also become better and more familiar with the environment. This action research using descriptive qualitative method will share interesting experiences regarding infrastructure development that empowers urban village communities living along the riverbanks of the city of Yogyakarta.*

**Keywords:** Kotaku, Kampung, Infrastructure, Neighborhood, Riverside

### Abstrak

*Arahan Presiden RI, Joko Widodo di Jakarta, 30 April 2020 menyatakan bahwa "Pemerintah butuh kecepatan untuk memberikan keselamatan seluruh rakyat Indonesia meski belum ada kepastian kapan pandemi akan berakhir." Salah satu program percepatan pembangunan yang terus dikembangkan sampai saat ini adalah Program Kota Tanpa Kumuh atau biasa dikenal dengan nama program KOTAKU. Program ini merupakan program upgrading kampung kota di Yogyakarta yang membuka akses permukiman tepi sungai melalui pengembangan fasilitas infrastruktur berbasis masyarakat yang berwawasan lingkungan berkelanjutan. Dinamika proses pembangunan ini menjadi sangat menarik karena banyak aspek yang ditangani, mulai dari penataan ruang permukiman, keamanan bermukim bagi masyarakat, pengembangan infrastruktur teknis seperti fasilitas air bersih, drainage, instalasi pengolahan limbah, mitigasi bencana, sampai pada detail pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berfokus pada kesamaan gender. Dengan dibukanya akses permukiman di tepi sungai, kegiatan perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di sepanjang tepi sungai menjadi meningkat dan kualitas lingkungan permukiman mereka juga menjadi lebih baik dan akrab dengan lingkungan. Penelitian aksi dengan metode kualitatif deskriptif ini akan membagikan pengalaman menarik mengenai pembangunan*

infrastruktur yang memberdayakan masyarakat kampung kota yang tinggal di sepanjang tepi sungai kota Yogyakarta.

**Kata Kunci:** Kotaku, Kampung, Infrastruktur, Lingkungan, Tepi Sungai

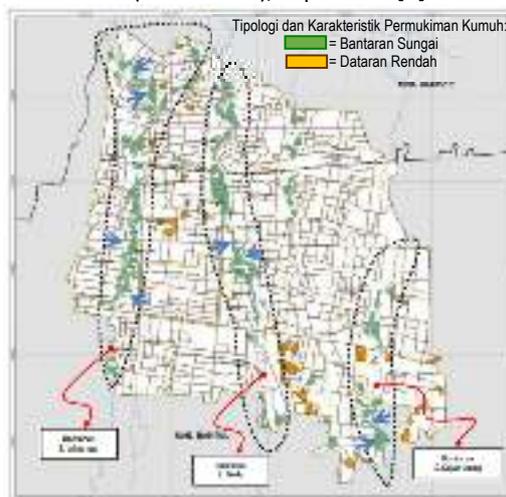
## 1. PENDAHULUAN

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno pada tanggal 12 April 2021 mempresentasikan paparannya dengan mengutip arahan presiden Djoko Widodo yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia butuh kecepatan untuk memberikan keselamatan seluruh rakyat Indonesia meski belum ada kepastian kapan pandemi akan berakhir. Pada paparan tersebut juga diungkapkan tentang 3 platform program Kemenparekraft kedepan yang bisa dimanfaatkan untuk strategi menstimulan pengembangan ekonomi masyarakat kampung kota dengan pembangunan fasilitas infrastruktur. Ketiga platform tersebut adalah Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi.[1]

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan program pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dilaksanakan pada tahun 2015 – 2019. Program ini merupakan kelanjutan dari program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Perkotaan. Tujuan dari program Kotaku ini adalah menata sarana dan prasarana lingkungan, meningkatkan perekonomian masyarakat.[2] Dalam pelaksanaannya program Kotaku melakukan pendekatan yang mengkombinasikan antara pendekatan Bottom Up secara partisipatif oleh masyarakat setempat dan pendetakan Top Down yang melibatkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta melibatkan beberapa stakeholder yang ada.[3]

Kondisi topografi kota Yogyakarta mempunyai tingkat kemiringan lahan yang relatif datar (0%-3%) menuju ke wilayah selatan. Dengan kondisi topografi tersebut, kota Yogyakarta dilalui tiga sungai besar yang membelah disisi sebelah timur, sungai Gajahwong; di tengah, sungai Code; dan sisi sebelah Barat sungai Winongo. Kondisi topografi ini memposisikan kota Yogyakarta pada cekungan bagian bawah gunung Merapi, sehingga sebagian besar tanahnya berupa tanah regosol atau vulkanis muda. (lihat Gambar 1) Pada sisi Selatan bagian timur yang berada di wilayah Kecamatan Umbulharjo dan sekitarnya mempunyai karakter jenis tanah lempung kepasiran (*sandy*

*clay*) dengan formasi geologi batuan sedimen andesit tua (*old andesit*)/kepasiran. [4]



Gambar 1. Tipologi dan Karakteristik Permukiman Kumuh yang Berkembang di Sepanjang Tepi 3 Sungai di Yogyakarta

[Sumber: *Unpublished Report* Pokja PKP: RP2KPKP Yogyakarta, 2016

Berkembangnya kota Yogyakarta akibat arus urbanisasi yang tinggi menyebabkan kawasan tepi sungai menjadi incaran pendatang untuk bermukim dengan tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal, karena banyak lahan kosong yang tidak termanfaatkan.[5] Keadaan ini menjadi jelas terlihat bahwa permukiman spontan informal di kota Yogyakarta berkembang di sepanjang tepi ketiga sungai yang melintasi kota Yogyakarta. Walaupun demikian pada beberapa wilayah terlihat permukiman kumuh berkembang pada dataran rendah, khususnya di wilayah bagian tenggara kota Yogyakarta.[6]

Permukiman kumuh yang berkembang di tepi sungai Yogyakarta pada umumnya menempatkan sungai sebagai bagian belakang dari rumah, sehingga tepi sungai mejadi tempat menumpuk semua barang-barang tidak terpakai dan tempat membuang sampah. Keadaan tersebut bisa dikatakan bahwa sungai menjadi tempat sampah besar bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang tepi sungai tersebut.[7] Pada Gambar 2 ditunjukkan kualitas lingkungan tepi sungai Gajahwong yang berada di wilayah Kelurahan Prenggan. Pada lokasi tersebut kwalitas jalannya sempit dan tidak teratur. Selain itu fasilitas infrastruktur teknis seperti

fasilitas air bersih, drainage, pengolahan limbah tidak tersedia dengan baik dan layak.



Gambar 2. Kualitas Tepi Sungai Gajahwong yang Berada pada Permukiman di Kelurahan Prenggan [Sumber: *Unpublished Presentation* Program Kotaku Yogyakarta, 2020]

Merebaknya Covid 19 pada awal tahun 2020 sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan program Kotaku di seluruh Indonesia. Keadaan

ini memaksa pihak pemerintah berusaha menyusun strategi pelaksanaan program Kotaku yang berbasis masyarakat sesuai dengan protocol kesehatan yang berlaku di Indonesia.[8] Strategi tersebut diterapkan di seluruh kota di Indonesia termasuk di kota Yogyakarta. (Lihat Gambar 3.) Proses penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman yang diawali dengan membangun visi, pendataan Baseline kumuh, penataan swadaya, perencanaan teknis penyusunan draft RPLP, sampai dengan penyusun DED umumnya dilaksanakan secara partisipatif dengan masyarakat.



Gambar 3. Strategi Pelaksanaan Program Kotaku pada Masa Pandemi Covid 19. [Sumber: *Unpublished Presentation* Program Kotaku “Penyusunan RPLP”, 2020]

Pada masa pendemi Covid 19 proses pelaksanaan penyusunan RPLP dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia. Mulai dengan penggunaan masker, cuci tangan, pengecekan suhu badan sampai dengan menjaga jarak antar peserta kegiatan dilaksanakan dengan ketat. Proses yang melibatkan cukup banyak masyarakat dengan pemerintah dan stakhoder lainnya dilakukan secara online. Pihak BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan fasilitator pendamping mempunyai peran yang cukup besar untuk keberhasilan pelaksanaan program kotaku di lapangan.

Pelaksanaan program Kotaku di kota Yogyakarta sangat berpengaruh pada perbaikan kualitas lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Proses pelaksanaan program Kotaku pada tahun terakhir didukung dengan support dari *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) dari pemerintah Australia melalui Bank Dunia.

Program Kotaku DFAT tahun 2021 dilaksanakan dengan menerapkan strategi inovasi penanganan permukiman kumuh yang inklusif dengan menerapkan aksesibilitas universal, berketahanan terhadap bencana (termasuk wabah), serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penghidupan masyarakat setempat secara berkelanjutan.[9] Program ini juga mendukung pencapaian akses terhadap infrastruktur dan pelayanan sarana air minum dan sanitasi, meningkatkan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19, dan mendorong kolaborasi dengan para pihak dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan. (*Website* Dirjen Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Takyat)

## 2. METODE PENELITIAN

Studi yang dijelaskan pada artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang datanya didapatkan melalui wawancara mendalam dan berpikiran terbuka (*in depth and open minded interview*); observasi langsung

(direct observation); dan dokumen tertulis (written documents). Wawancara menghasilkan kutipan langsung dari masyarakat tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuan mereka dalam menerima program Kotaku yang diimplementasikan. [10]

Proses pengamatan dilakukan secara rutin terhadap pelaksanaan program Kotaku di beberapa kelurahan di kota Yogyakarta sejak tahun 2016. Proses pelaksanaan program Kotaku diawali dengan proses membangun visi dan misi secara partisipatif bersama masyarakat kampung kota dan dilanjutkan beberapa proses seperti pada penjelasan yang sudah dilakukan pada bagian pendahuluan. (lihat Gambar 3.) Setelah proses implementasi program Kotaku diselesaikan, dapat diidentifikasi beberapa perubahan perbaikan kualitas lingkungan permukiman, baik secara fisik infrastruktur, sosial-budaya maupun aktivitas ekonomi masyarakat yang tinggal di tepi sungai.[11]

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Deskripsi Data

Berdasarkan data base yang sudah disahkan menjadi Surat Keputusan Walikota Yogyakarta No. 216 Tahun 2016, luasan kawasan kumuh di kota Yogyakarta sebesar 264,90 Ha, Kawasan kumuh tersebut tersebar di 13 Kecamatan yang terbagi menjadi 36 wilayah Kelurahan. (Lihat Gambar 4. Beserta tabel di atasnya) Seperti sudah dijelaskan pada bagian awal tulisan ini kawasan permukiman kumuh di kota Yogyakarta berkembang di sepanjang tepi 3 sungai yang membelah kota Yogyakarta.

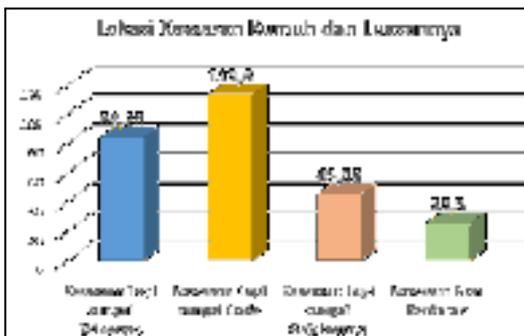
No.	Kecamatan	Luas Kawasan
1.	Mantrijeron	5,87
2.	Mergangsan	19,23
3.	Umbulharjo	63,23
4.	Kotagede	19,18
5.	Gondokusuman	17,58
6.	Danurejan	16,4
7.	Pakualaman	7,98
8.	Gondomanan	14,34
9.	Ngampilan	9,49
10.	Wirobrajan	7,4
11.	Gedongtengen	21,18
12.	Jetis	30,55
13.	Teglarejo	30,84
14.	Keraton	0



Gambar 4. Grafik Perbandingan luas Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta [Sumber: Unpublished Report RP2KPKP Kota Yogyakarta, 2017]

Meskipun sudah diimplementasikan program perbaikan permukiman kumuh pada tahun-tahun sebelumnya, sampai diturunkannya SK Walikota No. 216 Tahun 2016 kawasan permukiman kumuh masih tetap ada di kota Yogyakarta. Dari hasil verifikasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Yogyakarta terlihat permukiman kumuh terbesar berada pada wilayah Kecamatan Umbulharjo dengan luas 63,23 Ha. Sedangkan kawasan kumuh terkecil berada pada wilayah Kecamatan Mantrijeron dengan luas 5,87 Ha. Kecamatan Umbulharjo merupakan wilayah Kecamatan terbesar di kota Yogyakarta dengan luas 812 Ha dan kepadatan penduduk 97,03 jiwa/hektar. Walaupun Kecamatan Mantrijeron mempunyai luasan kawasan permukiman kumuh terkecil di kota Yogyakarta, tetapi dilihat dari kepadatan penduduknya cukup besar (124,07 jiwa/Ha) melebihi kepadatan penduduk di Kecamatan Umbulharjo

Karakteristik lokasi perkembangan permukiman kumuh dibagi menjadi dua, masing-masing kawasan permukiman kumuh yang berkembang di tepi bantaran sungai dan kawasan permukiman kumuh yang berkembang di kawasan non bantaran sungai. Gambar 5 menjelaskan bahwa kawasan permukiman kumuh yang berkembang di tepi bantaran sungai jauh lebih luas dari pada permukiman kumuh yang berkembang di kawasan non bantaran tepi sungai. Dari ketiga sungai yang membelah kota Yogyakarta, kawasan bantaran sungai Code mempunyai luas wilayah permukiman kumuh terbesar yaitu 113,8 Ha. (lihat Gambar 5.)

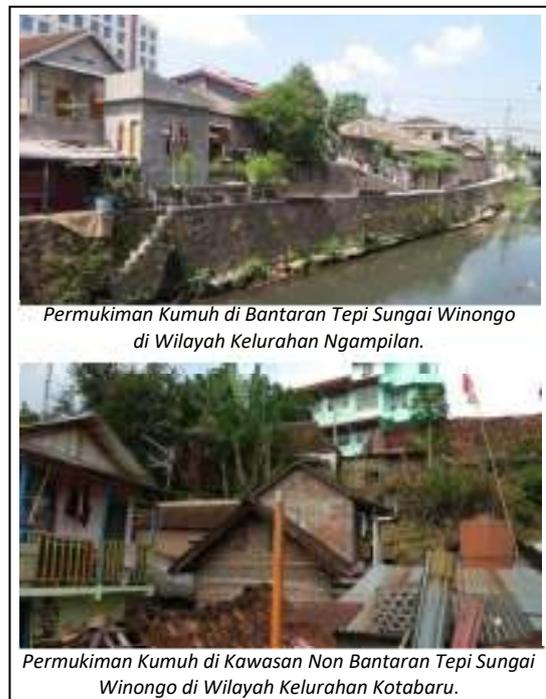


Gambar 5. Grafik Perbandingan luas Kawasan Permukiman Kumuh yang berkembang di Kasan Tepi Sungai dan Kawasan Non Bantaran Sungai. [Sumber: Unpublished Report RP2KPKP Kota Yogyakarta, 2017]

Hal ini terjadi karena sungai Code melintas pada bagian tengah kota Yogyakarta dimana pusat perdagangan Malioboro dan jalan Solo berkembang di dekatnya. Sedangkan kawasan bantaran sungai yang luas permukiman kumuhnya terkecil adalah kawasan tepi sungai Gajahwong dengan luas permukiman kumuhnya 45,85 Ha. Kawasan sungai Gajahwong yang melintasi wilayah Yogyakarta di sebelah Barat relative lebih pendek dibandingkan dengan sungai Winongo dan sungai Code. Pada Grafik 5 juga terlihat bahwa kawasan permukiman kumuh yang berkembang di kawasan non bantaran sungai jauh lebih kecil dibandingkan luas kawasan permukiman kumuh yang berkembang di bantaran ketiga sungai yang melintasi kota Yogyakarta. Pada umumnya kawasan permukiman non bantaran sungai berkembang dibelakang kawasan perdagangan.

Permukiman kumuh di wilayah kedua kawasan tersebut mempunyai karakteristik yang sama

yaitu kepadatan bangunannya tinggi, kualitas jalan lingkungan yang buruk. Ketersediaan air bersih yang minim, kualitas drainage yang tidak memadai, tidak ada pengolahan limbah domestic, pengelolaan sampah yang tidak memadai, sangat rawan terhadap bencana kebakaran dan ketersediaan ruang terbuka public yang sangat minim. (lihat Gambar 6.)



Permukiman Kumuh di Bantaran Tepi Sungai Winongo di Wilayah Kelurahan Ngampilan.

Permukiman Kumuh di Kawasan Non Bantaran Tepi Sungai Winongo di Wilayah Kelurahan Kotabaru.

Gambar 6. Kawasan Permukiman Kumuh yang berkembang di Kawasan Tepi Sungai dan Non Bantaran Sungai.

[Sumber: Unpublished Report RP2KPKP Kota Yogyakarta, 2017]

Kedua kawasan karakter kawasan permukiman kumuh tersebut mempunyai perbedaan yang sangat tinggi berdasarkan posisi geografisnya. Perbedaan geografis tersebut berpengaruh juga pada behaviour masyarakat berpengaruh juga pada behaviour masyarakat berpengaruh juga pada behaviour masyarakat menengah ke bawah yang tinggal di wilayah tersebut.[12] Masyarakat yang tinggal di sepanjang tepi sungai pada umumnya memosisikan sungai sebagai bagian belakang rumah mereka. Akibatnya pada beberapa spot tepi sungai menjadi tempat sampah besar untuk membuang semua limbah padat yang dihasilkan mereka. Selain itu untuk limbah domestic pada semua rumah yang berada di tepi sungai dibuang langsung ke sungai, sehingga menyebabkan kualitas lingkungan di sekitar sungai tersebut menjadi buruk. Sedangkan permukiman yang berkembang di kawasan non

bantaran lebih banyak membuang sampah pada lahan-lahan sisa yang ada pada permukiman, sehingga kualitas lingkungan di dalam permukiman menjadi lebih buruk lagi. Untuk pembuangan limbah domestik kebanyakan mereka membuat septoictank yang tidak standard (Cubluk) yang sangat mencemari tanah yang ada pada permukiman.[7]

Dengan kondisi permukiman kumuh yang seperti dijelaskan di atas pihak pemerintah daerah berkolaborasi dengan masyarakat setempat dan stakeholder lainnya melaksanakan program Kotaku yang sebenarnya melanjutkan program-program sebelumnya untuk menghilangkan kekumuhan pada kawasan kampung kota di Yogyakarta. Mulai dari tahun 2016 sampai dengan saat ini program Kotaku masih dijalankan secara bertahap untuk mengurangi kekumuhan kampung kota di wilayah 14 Kecamatan yang terbagi menjadi 45 wilayah Kelurahan. Target yang menjadi tujuan program kotaku adalah menghilangkan kawasan kumuh dengan cara mengatasi 7 kriteria + 1 yaitu: kriteria bangunanedung, kriteria jalan lingkungan, kriteria penyediaan air minum. Kriteria pengelolaan air limbah. Kriteria pengolahan persampahan, kriteria pengamanan kebakaran dan ditambah satu yaitu ruang tersedia publik.

### 3.2 Pembahasan

Pada awalnya target untuk mengurai kekumuh ditetapkan pemerintah pusat untuk menghilangkan kekumuhan pada tahun 2019. Tekan pemerintah tersebut dituangkan dalam konsep pengembangan kawasan kumuh yang dikenal dengan 100 - 0 -100. Pemahaman terhadap konsep tersebut adalah pada tahun 2019 semua kawasan permukiman di Indonesia harus mempunyai akses pada air bersih 100%, luasan kawasan permukiman kumuh harus menjadi 0%, dan 100% kawasan permukiman di Indonesia harus mempunyai akses pada sanitasi yang layak dan memadai.

Dengan adanya program Kotaku, semua kota di Indonesia termasuk kota Yogyakarta menggeliat untuk berusaha keras menghilangkan kawasan kumuh yang ada di wilayahnya. Pada program sebelumnya, program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat (PLPBK), masyarakat kota Yogyakarta yang tinggal di sepanjang tepi sungai sudah mempunyai

strategi gerakan pengembangan permukiman yang dikenal dengan Mundur, Munggah, Madep Kali (M3K) yang artinya adalah memundurkan rumah (Mundur) di tepi sungai, menaikkan pengembangan rumahnya (Munggah/Naik), menghadapkan rumahnya ke Sungai (Madep/Menghadap ke Kali/Sungai). Dengan program, ini semangat masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan di sepanjang tepi sungai semakin tinggi. Dengan gerakan M3K tersebut implementasi program Kotaku di kawasan kampung kota Yogyakarta dilaksanakan secara kolaboratif antara pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan masyarakat setempat bersama stakeholder lainnya.

Program Kotaku dilaksanakan oleh Direktorat jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan target pengembangan infrastruktur yang difokuskan pada 7 Kriteria kampung kumuh perkotaan ditambah dengan satu kriteria yaitu Ruang Terbuka Hijau. Walaupun program ini difokuskan pada penataan dan pengembangan fasilitas infrastruktur perkotaan, dampak yang terjadi pada masyarakat sangat luas terutama terkait dengan perubahan kehidupan sosial-budaya, ekonomi dan terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan berkelanjutan. (Lihat Gambar 8)

Pada hampir semua wilayah Kelurahan di Kota Yogyakarta yang sudah mendapatkan program Kotaku di wilayahnya, terjadi perkembangan ekonomi masyarakat setempat, terutama mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah. Dengan dibukanya akses infrastruktur jalan kampung yang berada di tepi sungai, masyarakat setempat banyak yang membuka kios/warung untuk berjualan di depan rumahnya, maupun membawa hasil dagangannya yang dijual di sector informal dengan sangat mudah.



Gambar 7. Kawasan Permukiman Kumuh yang berkembang di Kawasan Tepi Sungai dan Non Bantaran Sungai.

[Sumber: Unpublished Report Program Kotaku: Profil wilayah Kelurahan Muja 2019 dan Dokumentasi Skala Kawasan & Infrastruktur Livelihood Tahun 2020]

Bagian belakang rumah yang tadinya kumuh sebagai tempat buangan sampah, saat ini berubah menjadi akses jalan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. (lihat Gambar 9.) Selain itu kualitas lingkungan di sepanjang tepi sungai menjadi lebih indah dan rapi. Jalan selebar 3 meter atau lebih juga dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk menjadi jalan inspeksi yang berkaitan

dengan pembersihan dan perawatan sungai itu sendiri.



Gambar 8. Pembukaan Akses Infrastruktur Jalan yang Dimanfaatkan Masyarakat untuk Membuka Kios Berkaitan dengan Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Kelurahan Ngampilan

[Sumber: Unpublished Booklet: "An Overview of Neighbourhood Development, Kelurahan Karangwaru & Ngampilan – Yogyakarta, 2019]

Pada program Kotaku tahun 2021 dilakukan percepatan pembangunan fasilitas infrastruktur dengan support dana dari *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT), Pemerintah Australia melalui Bank Dunia. Program Kotaku DFAT ini dilaksanakan dengan bantuan dana stimulant sebesar Rp2.000.000.000,- untuk setiap Kelurahan yang dipandang layak dan mampu melaksanakan program. Pada program Kotaku DFAT masih tetap difokuskan pada pengembangan fasilitas infrastruktur dengan 7 Kriteria + 1 ditambah dengan mengarusutamakan masalah *Gender Equity and Social Inclusive* (GESI) dan Mitigasi Bencana. Dengan demikian program Kotaku DFAT semakin melengkapi pembangunan kampung kota dengan mempertimbangkan kelompok rentan (masyarakat difabel, anak-anak, dan orang tua) serta berusaha keras melakukan mitigasi bencana yang sering dialami masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di tepi sungai.

Kota Yogyakarta mendapatkan program Kotaku DFAT sebanyak 4 paket yang lokasi implementasinya berada di wilayah Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo; Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman; Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan; dan Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo. Pelaksanaan program Kotaku DFAT di keempat Kelurahan tersebut di atas dilakukan dengan strategi yang sama yaitu mengajak masyarakat setempat untuk berpartisipasi membuat

perencanaan dan juga melaksanakan pembangunannya. Pendampingan fasilitator dalam pelaksanaan program Kotaku DFAT sangat berarti untuk melakukan pemberdayaan pada masyarakat setempat.[11]

Salah satu penerima program Kotaku DFAT adalah Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman. Wilayah Kelurahan Baciro sebagai wilayah penunjang kota merupakan wilayah yang sangat strategis. Pada beberapa ruas jalan utama banyak terdapat tempat usaha seperti pasar tradisional, pertokoan, perkantoran, juga terdapat Kampus dan tempat pendidikan lainnya. Sebagian besar masyarakat kawasan permukiman kumuh kelurahan Baciro yang berada di bantaran Sungai Manunggal bekerja sebagai karyawan/buruh, tukang, pedagang/wiraswasta.

Penanganan kumuh kelurahan Baciro di prioritaskan pada kawasan sesuai dengan SK Walikota Kota Yogyakarta No. 216 Tahun 2016 dengan anggaran dari kegiatan Program Kotaku maupun dari kegiatan kolaborasi. Penanganan kumuh di kegiatan kolaborasi bisa menyasar dilokasi kumuh Sk Walikota maupun lokasi non kumuh SK Walikota. Titik ukurnya adalah bagaimana pihak kelurahan dalam menangani permasalahan kumuh yang ada serta dalam pengendalian/pencegahan kumuh yang ada diwilayahnya. Penanganan kumuh kelurahan Baciro yang diprioritaskan pada kawasan sesuai dengan SK Walikota Kota Yogyakarta No. 216 Tahun 2016 yang sudah ditangani sampai dengan tahun 2019 dan sebagian besar sudah mengurangi skor kumuh menjadi dibawah nilai 19, sesuai dengan standard skor yang diharapkan dapat dicapai oleh program Kotaku. Walaupun demikian, dalam penanganan permukiman kumuh tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan karena berbagai hal , antara lain:

- Lokasi terbatas untuk penempatan IPAL/Septictank Komunal
- Lebar jalan kurang dari 1,5 meter
- Prioritas pekerjaan yang dilaksanakan dahulu belum semua aspek permasalahan tertangani

Berkaitan dengan program Kotaku DFAT yang terkait dengan kualitas lingkungan yang mengarusutamakan GESI dan Mitigasi Bencana, pengembangan wilayah Kelurahan baciro tetap membangun infrastruktur jalan lokal yang

menggunakan standard inklusif seperti penggunaan guiding block dan railing pada kawasan yang dikembangkan, sehingga masyarakat rentan dapat mengakses semua fasilitas dengan baik. Pengembangan fasilitas pengolahan limbah komunal dibangun pada beberapa lokasi untuk menampung banyak keluarga yang belum memiliki fasilitas septictank dirumah mereka. Karena kesulitan mencari ruang terbuka umum yang dapat dimanfaatkan untuk meletakkan fasilitas pengolahan limbah, maka masyarakat menyepakati menggunakan badan jalan yang agak lebar untuk dijadikan lokasi pengolahan limbah komunal.

Jaringan drainage yang ada pada wilayah Kelurahan Baciro yang sering kali banjir pada saat musim penghujan, dilakukan perbaikan dan pengembangan jaringan agar dapat mengatasi masalah banjir. Bagian tengah wilayah Kelurahan Baciro juga dilalui saluran irigasi yang menjadi wewenang institusi Sumber Daya Air Propinsi. Saluran irigasi ini sebelumnya sering dimanfaatkan masyarakat setempat untuk mengalirkan limbah domestik mereka (*black & grey water*) langsung dari rumah ke saluran irigasi. Akibatnya saluran irigasi tersebut menjadi kumuh dan sangat tidak terawat dengan baik. Dengan adanya pembangunan Instalasi pengolahan limbah (IPAL) komunal, semua limbah domestik masyarakat yang tinggal di sekitar saluran irigasi membuang limbah mereka ke IPAL Komunal. Dengan demikian kualitas lingkungan sepanjang saluran irigasi menjadi jauh lebih baik lagi. Pembiayaan pembangunan drainage dan perbaikan saluran irigasi didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dana kolaborasi untuk mengentaskan kekumuhan di wilayah Kelurahan Baciro.

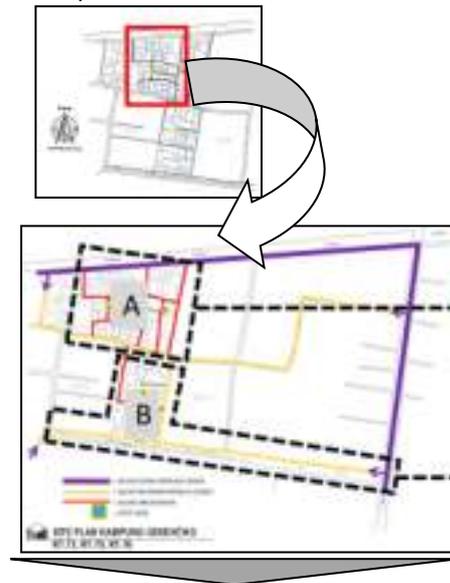
Penanganan masalah GESI dilakukan dengan membangun penerangan jalan pada beberapa lokasi yang cukup rawan pada saat malam hari saat para wanita melewati daerah tersebut. Beberapa lokasi jalan yang rawan terhadap orang tua dan anak-anak seperti keadaan jalan yang tidak rata, terdapat lobang-lobang yang dapat menyebabkan mereka jatuh juga dilakukan perbaikan. Khususnya pada tepi saluran irigasi yang taddinya tidak ada pengaman, dibangun pagar sebagai pengaman untuk anak-anak bermain atau orang tua yang akan melintasi jalan di tepi salurn irigasi.

Pembangunan fasilitas kamar mandi umum yang sifatnya inklusif direncanakan dan dilaksanakan pembangunannya oleh masyarakat dengan dampingan fasilitator program Kotaku. Pada saat perencanaan, masyarakat kelompok rentan diajak berdiskusi tentang pembangunan kamar mandi umum yang inklusif. Ada banyak masukan dari para calon pengguna yang membutuhkan khusus (*diffable*) maupun para lansia yang tinggal di wilayah Kelurahan Baciro. Dengan adanya masukan tersebut pembangunan kamar mandi inklusif tersebut dibangun pada salah satu wilayah dengan cara merenovasi kamar mandi umum yang lama. Beberapa persyaratan untuk masyarakat *diffable* seperti *guiding block*, *reiling*, WC duduk, perletakan kran air, perletakan pintu sampai dengan jalur sirkulasi menuju lokasi kamar mandi umum dikerjakan dengan teliti oleh masyarakat.

Sebelum diresmikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, fasilitas yang dibangun dengan prinsip-prinsip dasar inklusif diuji cobakan pada masyarakat yang *diffable*. Tim fasilitator mengundang asosiasi atau kelompok masyarakat *diffable* untuk mencoba fasilitas yang sudah dibangun. Kelompok *diffable* yang diundang untuk mencoba fasilitas tersebut terdiri dari masyarakat dengan kursi roda dan tuna netra. Mereka mencoba fasilitas tersebut mulai dari jalan masuk kampung sampai menuju lokasi kamar mandi umum inklusif yang sudah dibangun. (Lihat Gambar 10) Masyarakat *diffable* tersebut juga mencoba closet duduk yang sudah dibangun, membuka dan menutup pintu kamar mandi dan menyalakan lampu serta menggunakan kran air yang sudah dipasang.

Hasil uji coba memberikan banyak catatan yang perlu dilakukan terkait perbaikan fasilitas kamar mandi umum inklusif. Perbaikan yang harus dilakukan antara lain bukan pintu kamar mandi yang harus dirubah karena mempersulit masyarakat yang mempergunakan kursi roda. Demikian juga dengan perletakan skalkar untuk menyalakan dan mematikan lampu, posisinya juga harus dirubah dan sedikit diturunkan ketinggiannya. Fasilitas penuntun arah bagi masyarakat tunanetra sudah dibangun cukup memadai, karena masyarakat tunanetra dapat melakukan proses ke kamar mandi umum dan

menggunakan fasilitas di dalamnya tanpa mendapatkan kesulitan.



Gambar 9. Uji Coba Pemanfaatan Fasilitas Kamar Mandi Umum Inklusif oleh Masyarakat *Diffable* di Wilayah Kelurahan Baciro

[Sumber: Unpublished Booklet: "An Overview of Neighbourhood Development, Kelurahan Karangwaru & Ngampilan – Yogyakarta, 2019]

Setelah proses perbaikan fasilitas kamar mandi umum inklusif selesai dilakukan, masyarakat cukup puas dan merasa senang sekali karena wilayahnya berkembang menjadi lebih baik. Keadaan yang paling menyenangkan masyarakat adalah fasilitas umum yang

dibangun di wilayah Kelurahan baciro juga bermanfaat untuk masyarakat rentan yang tinggal disana. Keadanan ini juga terjadi pada ketiga wilayah yang mendapatkan program Kotaku DFAT. Hanya saja fasilitas kamar mandi umum inklusif hanya dibangun di wilayah Kelurahan Baciro dan Kelurahan Prawirodirjan. Kedua wilayah lainnya tidak bisa membangun fasilitas kamar mandi umum inklusif karena tidak ada lahan yang dapat dimanfaatkan untuk fasilitas kamar mandi tersebut. Walaupun demikian, seluruh fasilitas infrastruktur yang dibangun pada keempat wilayah Kelurahan di kota Yogyakarta tetap dilaksanakan dengan prinsip-prinsip mengutamakan *Gender Equity and Social Inclusif, disaster mitigation, Water and Sanitation* (Watsan).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan diskusi yang sudah diuraikan mulai dari awal sampai akhir artikel ini jelas terlihat bahwa pembangunan fasilitas infrastruktur permukiman pada wilayah kampung kota di Yogyakarta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya termasuk peningkatan perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah. Secara terperinci peningkatan kualitas hidup tersebut teridentifikasi seperti berikut:

- Kawasan tepi sungai terlihat lebih rapi dengan jalan inspeksi di tepi sungai yang sangat bermanfaat untuk melakukan perawatan sungai agar bersih dan lebih lancar alirannya.
- Fasilitas infrastruktur teknis seperti jaringan drainage dan air bersih dapat diakses dengan baik oleh masyarakat tanpa takut pencemaran air akibat septic-tank dan sumur resapan yang tidak standard.
- Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) komunal dibangun untuk masyarakat, sehingga semua limbah domestik cair, baik black- maupun grey-water yang tadinya langsung dibuang ke sungai, sekarang sudah diolah terlebih dahulu dengan IPAL, kemudian outlet dari IPAL langsung dibuang ke sungai.
- Walaupun banyak rumah yang dipotong untuk membuka akses jalan di tepi sungai tanpa ganti rugi, masyarakat tetap senang karena kualitas lingkungan sekitar rumah menjadi bersih dan memungkinkan mereka membuka usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil diskusi di atas, kesimpulan akhir yang dapat diberikan adalah bahwa keterlibatan masyarakat secara total partisipatif mulai dari proses survey lapangan, perencanaan, implementasi, sampai dengan melakukan perawatan, dapat mengubah kebiasaan buruk masyarakat untuk hidup sehat dan bertempat tinggal pada lingkungan yang berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. S. Uno, "Strategi Pemulihan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," 2021.
- [2] M. Irwansyah, C. Nursaniah, and L. Qadri, "Flood Adaptive Settlements Towards Urban Development in the Riparian of Meureudu River, Aceh Province, Indonesia," *Malaysian J. Sustain. Environ.*, vol. 6, no. 2, p. 47, 2019, doi: 10.24191/myse.v6i2.8685.
- [3] Direktur\_PKP\_Perkotaan\_dan\_Pedesaan, "Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Pedesaan," Jakarta, 2017.
- [4] P. Bawole, "Appreciating the growth of informal utilization of city space for sustainable urban development in Yogyakarta city," 2020, doi: 10.1088/1755-1315/402/1/012013.
- [5] P. Bawole, "No Title Neighborhood Development Strategy to Empower Local Community for Tourism Development in Urban Kampong Settlement within Yogyakarta City," 2019, [Online]. Available: [https://publikasi.ukdw.ac.id/\\_documents/1016\\_8\\_894E098.pdf](https://publikasi.ukdw.ac.id/_documents/1016_8_894E098.pdf).
- [6] M. Tran and D. Krause, *Transformative Adaptation to Climate Change and Informal Settlements in Coastal Cities Entry Points for Jakarta and Ho Chi Minh City*, no. December. 2019.
- [7] C. A. Petrie *et al.*, "Adaptation to Variable Environments, Resilience to Climate Change: Investigating land, water and settlement in Indus northwest India," *Curr. Anthropol.*, vol. 58, no. 1, pp. 1–30, 2017, doi: 10.1086/690112.
- [8] P. Bawole, "Redefinisi Ruang Publik di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus di Kota Yogyakarta," *Vitruvian*, vol. 10, no. 3, 2021, doi: DOI: dx.doi.org/

10.22441/vitruvian.2021.v10i3.00.

- [9] A. W. Wardana, A. H. Purnomo, and Y. Winarto, "Penerapan Konsep Arsitektur Adaptif Pada Perancangan Kampung Vertikal Di Kawasan Kumuh Dan Rob, Semarang," *SenTHong*, vol. 2, no. 2, pp. 437–446, 2019, [Online]. Available: <https://jurnal.ft.uns.ac.id/index.php/sen-thong/article/view/979/467>.
- [10] D. Silverman, "David Silverman (Ed.) - Qualitative Research\_ Theory, Method and Practice-Sage Publications Ltd (2004).pdf." 2004.
- [11] A. C. P. Sari, A. Suman, and D. Kaluge, "Implementation Analysis Of Participative Development In National Slum Upgrading Program [ KOTAKU ]," *IJEBD (International J. Entrep. Bus. Dev.)*, vol. 2, no. 1, pp. 17–35, 2018, [Online]. Available: <https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/ijebd/article/view/646>.
- [12] E. Purwanto, A. Sugiri, and R. Novian, "Determined slum upgrading: A challenge to participatory planning in Nanga Bulik, Central Kalimantan, Indonesia," *Sustain.*, vol. 9, no. 7, 2017, doi: 10.3390/su9071261.